

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**SEMESTA BERENCANA**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2023**



**2022**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penyusunan Renja .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN LALU</b> .....	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali .....	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	12
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>14</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	14
3.3 Progran Dan Kegiatan .....	15
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI</b> .....	<b>16</b>
<b>BABV PENUTUP</b> .....	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup, sebagaimana amanat pemerintah pusat, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip *Money Follow Function* diubah menjadi *Money Follow Program* serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasi.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka *strategi pembangunan kelautan dan perikanan* yang ditempuh adalah Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan tetap terjaga kelestariannya, Pemberdayaan masyarakat, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), dan Penggalan potensi pendapatan baru dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Untuk itu, kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi, Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap, Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan, Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN), dan Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam pasal 11 disebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah; selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sementara dalam pasal 1

ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2023 diajukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi, Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2023 diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Bali selanjutnya diajukan untuk mendapat pengesahan dari Gubernur Bali.

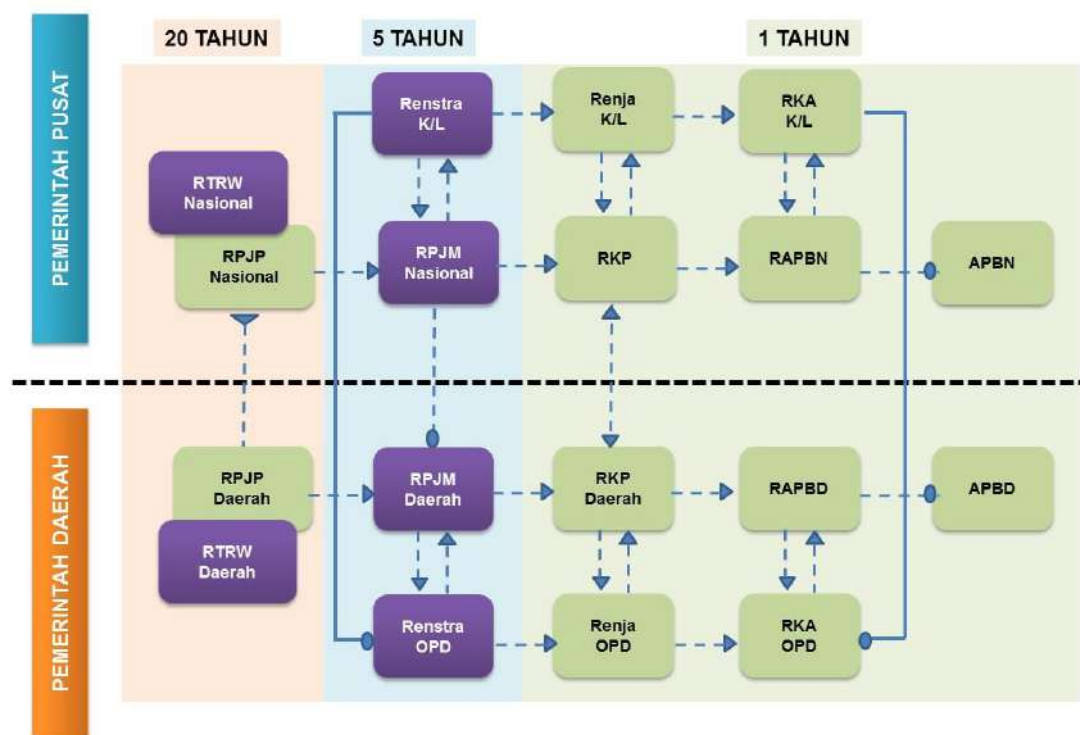
Terkait dengan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2023 pada bulan Juli Tahun 2022, sebagai dasar penyusunan Renja Tahun 2023 didasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2018-2023, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 serta hasil evaluasi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018. Konskuensi logis dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2018-2023, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2023, wajib mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2023 diawali dengan mengajukan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi dilanjutkan pada proses di Sekretariat daerah. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali dengan materi orientasi meliputi tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2023, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusunan Renja Perangkat daerah dan kesiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**Diagram 1.1**

Hubungan Dokumen Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan,Dokumen,Perencanaan Lainnya



Mengacu pada gambar diatas dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja PD mengacu pada RKPD sebagai dampak adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi, dengan mengacu pada Renstra PD, Renja PD dan KUA/PPAS menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD, selanjutnya akan menjadi acuan DPA PD, yang merupakan penjabaran dari APBD.

## 1.2 Dasar hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7).
- 12) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
- 13) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- 14) Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- 15) Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Sebagaimana diuraikan di Atas bahwa maksud penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2023 adalah merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Renja Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 khususnya Rencana Kerja Tahun 2023 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2023 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2023 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2023 adalah :

- 1) Menjabarkan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2023;
- 2) Merancangan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2023;

- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2023 dengan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2023**

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

BAB II. Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

Pada Bab III Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali



diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

Bab IV. Renja Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Perubahan Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain :Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN LALU**

Dalam BAB II; Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pilihan; dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Kelautan dan Perikanan tetap dinyatakan sebagai Urusan Pilihan.

##### **2.2.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan**

Tugas Pokok Dinas adalah:

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya

Fungsi Dinas adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang kelautan dan perikanan
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data tahun 2022, komposisi kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1.1**  
**Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	23
3	Strata 1	55
4	Diploma IV	5
5	Diploma III	1
6	Diploma II	-
7	Diploma I	1
8	SLTA / Sederajat	30
9	SLTP / Sederajat	1
10	SD	1
<b>Total</b>		<b>117</b>

**Tabel 2.1.1.2**

**Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	21
2	Golongan III	70
3	Golongan II	25
4	Golongan I	1
<b>Total</b>		<b>117</b>

**Tabel.2.1.1.3**

**Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan Struktural**

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	9
3	Eselon IV	27
4	Fungsional	80
<b>Total</b>		<b>117</b>

Pada tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Bali dalam Urusan Kelautan dan Perikanan melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun keempat akan diuraikan secara detail pada lampiran capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tergolong baik, dengan mendapat alokasi belanja langsung dari APBD Provinsi Bali sebanyak Rp. 29.167.354.373,00 dengan realisasi fisik 98,89% dan keuangan Rp.24.559.212.171,12 (84,20%).

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali merupakan Dinas yang tidak mengukur kinerjanya berdasarkan SPM, tetapi menggunakan NSPK dan IKK serta IKU. Norma Standar Prosedur Kegiatan telah dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, sedangkan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 IKK sebagai ukuran keberhasilan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.7 Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk jelasnya berikut disajikan dalam tabel T-C 29 (lampiran II) dan tabel T-C 30.

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2021		% Capaian	Ket
			Target	Realisasi		
1	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang dihasilkan	119.691,76 Ton	134.211,1 Ton	112%	
2	Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	26.825,31 Ton	26.825,31 Ton	100%	
2	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	3 Kawasan	3 Kawasan	100%	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali**

Adapun Isu – Isu Yang Berkembang Pada Tahun 2021 Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Adalah Sebagai Berikut :

#### **2.3.1 Isu-Isu**

1. Belum optimalnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
2. Masih rendahnya daya saing produk kelautan dan perikanan;
3. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan;
4. Menurunnya kualitas ekosistem perairan umum, pesisir dan laut; dan
5. Belum optimalnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang pendapatan daerah.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka strategi pembangunan *kelautan dan perikanan* yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan tetap terjaga kelestariannya;
2. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
3. Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan;
4. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);
5. Penggalian potensi pendapatan baru dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam Review terhadap RKPD diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2021 dan kebutuhan tahun 2023. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2023.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2023, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan Beberapa indikator berbeda karena mengacu

pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023( Lampiran III Tabel T-C 31)

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Konsultasi Publik ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Provinsi Bali**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya	5 Kawasan	
			Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	1 Kawasan	
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Jumlah produksi perikanan tangkap	107.269,84 Ton	
			Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan	2 Palabuhan	

			Tangkap di Pelabuhan		
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9 Kabupaten/ Kota di Bali	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	19.360,82 Ton	
			Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Provinsi Bali	Jumlah pelaku usaha taat Hukum	23 Pelaku Usaha	
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Provinsi Bali	Jumlah produk perikanan bersertifikat	151 SKP	
			Jumlah Hasil Uji yang Dikeluarkan	5000 Sample	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk menyusun Tujuan dan sasaran diperlukan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bali 2018-2023. Selanjutnya pada Pada Bab III Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disusun telaahan kebijakan Kelautan dan Perikanan pada Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN. Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada RPJMN secara ringkas adalah : Mendukung ketahanan pangan, daya saing dan nilai tambah Kelautan dan Perikanan serta memelihara keberlanjutan pembangunan.

Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah:.

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak;
2. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian;
3. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **3.2.1 Tujuan**

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali;
2. Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali;
3. Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi.

##### **3.2.2 Sasaran**

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan sasarannya Renja adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan;
2. Meningkatnya daya saing produk perikanan;
3. Meningkatnya pengelolaan ruang laut.



Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Lampiran I Tabel T-C 25 sebagaimana terlampir.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan Kelautan dan Perikanan berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain dan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan. Program/Kegiatan dapat diamati pada (lampiran IV tabel T-C 33).

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN**  
**PERIKANAN PROVINSI BALI**

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Perubahan Renstra dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan seluruh Program/Kegiatan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali maka dibutuhkan dana sebesar Rp. 23.008.661.409,00. Program – program tersebut diuraikan sebagai berikut :

- | <b>No</b> | <b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                          |
| <b>1</b>  | <b><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>                                        |
|           | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |
|           | 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                         |
|           | 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                |
|           | 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                  |
|           | 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                       |
|           | 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   |
| <b>2</b>  | <b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>                                                                  |
|           | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |
| <b>3</b>  | <b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>                                                                      |
|           | 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |
|           | 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |
| <b>6</b>  | <b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>                                   |
|           | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |
|           | 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |
|           | 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |
| <b>2</b>  | <b>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil</b>                                                    |
| <b>1</b>  | <b><i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil</i></b>                                                             |
|           | 1 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat |
| <b>2</b>  | <b><i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i></b>                                                   |
|           | 1 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                     |
| <b>3</b>  | <b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>                                                                          |
| <b>1</b>  | <b><i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i></b>                                       |
|           | 1 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                        |
| <b>2</b>  | <b><i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i></b>                             |
|           | 1 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                    |
| <b>4</b>  | <b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>                                                                         |

- 1 *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut***
  - 1 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 5 *Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan***
  - 1 *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil***
    - 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
    - 2 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
- 6 *Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan***
  - 1 *Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar***
    - 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
    - 2 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

Pada tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Bali dalam Urusan Kelautan dan Perikanan melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penting dipedomani untuk memberi arah bagi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 dimasing-masing Perangkat Daerah Provinsi Bali. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah merupakan dokumen strategis tahunan guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Gubernur Bali yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, lebih lanjut akan menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan indikator dan target yang telah tercantum.

  
GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER

**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	0	0	0	121.713,44 Ton	124,147.71 ton	126,630.66 ton
2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	0	0	0	25,516,85 Ton	26.825,31 ton	28.166,57 ton
3	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya pengelolaannya ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	0	0	0	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan

**TABEL T-C 29**  
**PENCAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
			K	Nilai	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	3	4	7			8		9 = (8/7) x 100%		12	13
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78	Nilai	11,717,712,690.00	78.00%	10,755,832,974.12	1.00%	91.79%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78	Nilai	-	0	-	0.00%	0.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen	1	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78	Nilai	9,878,013,604.00	78%	9,245,338,075.00	1.00%	93.60%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52	dokumen	9,878,013,604.00	52.00	9,245,338,075.00	100.00%	93.60%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78	Nilai	146,568,610.00	78%	145,264,705.00	1.00%	99.11%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1	tahun	23,627,210.00	1.00	23,516,630.00	100.00%	99.53%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	1	tahun	75,000,000.00	1.00	75,000,000.00	100.00%	100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1	tahun	12,861,400.00	1.00	12,839,325.00	100.00%	99.83%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Tahun	1	tahun	35,080,000.00	1.00	33,908,750.00	100.00%	96.66%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi manajemen kinerja</b>	<b>78</b>	<b>Nilai</b>	<b>97,000,000.00</b>	<b>78%</b>	<b>2,440,000.00</b>	<b>1.00%</b>	<b>2.52%</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	1	tahun	97,000,000.00	1.00	2,440,000.00	100.00%	2.52%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi manajemen kinerja</b>	<b>78</b>	<b>Nilai</b>	<b>119,365,076.00</b>	<b>78%</b>	<b>110,123,663.00</b>	<b>1.00%</b>	<b>92.26%</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyura	1	tahun	3,000,000.00	1.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1	tahun	116,365,076.00	1.00	107,123,663.00	100.00%	92.06%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>1,476,765,400.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1,252,666,531.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>84.83%</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
3.25.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	1	tahun	537,702,984.00	1.00	523,588,024.00	100.00%	97.37%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	tahun	691,512,416.00	1.00	690,942,707.12	100.00%	99.92%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	1	tahun	247,550,000.00	1.00	38,135,800.00	100.00%	15.41%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>3.25.02</b>	<b>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan</b>	<b>1</b>	<b>Ha</b>	<b>49,028,448.00</b>	<b>1.00</b>	<b>88,409,946.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>180.32%</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>

3.25.02.1.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.</b>	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1	kawasan	49,028,448.00	1.00	45,728,498.00	100.00%	93.27%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali	1	Dokumen	44,650,648.00	1.00	42,517,448.00	100.00%	95.22%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	5	kawasan	4,377,800.00	5.00	3,211,050.00	100.00%	73.35%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.02.1.02	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya</b>	5	kawasan	42,771,748.00	5.00	42,681,448.00	100.00%	99.79%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	5	kawasan	42,771,748.00	5.00	42,681,448.00	100.00%	99.79%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah produksi perikanan tangkap</b>	101,082.74	ton	145,716,768.00	100,755.76	145,300,248.00	99.68%	99.71%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.03.1.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	101,082.74	ton	145,716,768.00	100,755.76	145,300,248.00	99.68%	99.71%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.03.1.01.01	Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyusunan Data dan Informasi Sumber daya Ikan	8	kabupaten	41,881,868.00	8.00	41,606,048.00	100.00%	99.34%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.03.1.01.03	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Fasilitasi Pendamping LPMUKP	8	orang	103,834,900.00	8.00	103,694,200.00	100.00%	99.86%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	18,609.02	ton	38,387,148.00	33,455.34	38,306,448.00	179.78%	99.79%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.04.1.05	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	18,609.02	ton	38,387,148.00	33,455.34	38,306,448.00	179.78%	99.79%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di laut dan lintas darat	Jumlah monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	17	kali	38,387,148.00	17.00	38,306,448.00	100.00%	99.79%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	



3.25.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA LAUT DAN PERIKANAN</b>	<b>Jumlah pelaku usaha taat Hukum</b>	<b>50</b>	<b>pelaku usaha</b>	<b>18,240,000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>18,240,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
3.25.05.1.01	<b>Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL</b>	<b>Jumlah Pelaku usaha taat hukum</b>	<b>23</b>	<b>pelaku usaha</b>	<b>13,680,000.00</b>	<b>23.00</b>	<b>13,680,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Kelautan Yang diawasi	13	pelaku usaha	9,120,000.00	13.00	9,120,000.00	100.00%	100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi	8	pelaku usaha	3,040,000.00	8.00	3,040,000.00	100.00%	100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan Budidaya yang diawasi	2	pelaku usaha	1,520,000.00	2.00	1,520,000.00	100.00%	100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.05.1.02	<b>Pengawasan Sumber daya perikanan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi</b>	<b>Jumlah pelaku usaha taat hukum</b>	<b>10</b>	<b>pelaku usaha</b>	<b>4,560,000.00</b>	<b>10.00</b>	<b>4,560,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
3.25.05.1.02.03	Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diawasi	10	pelaku usaha	4,560,000.00	10.00	4,560,000.00	100.00%	100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.06	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Jumlah produk yang bersertifikat</b>	<b>149</b>	<b>SKP</b>	<b>99,393,868.00</b>	<b>309</b>	<b>96,744,048.00</b>	<b>207.38%</b>	<b>97.33%</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
3.25.06.1.02	<b>Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar</b>	<b>Jumlah produk yang bersertifikat</b>	<b>149</b>	<b>SKP</b>	<b>99,393,868.00</b>	<b>309</b>	<b>96,744,048.00</b>	<b>207.38%</b>	<b>97.33%</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
3.25.06.1.02.01	Sub kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan	200	paket	99,393,868.00	200.00	96,744,048.00	100.00%	97.33%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
25			UPI		25.00		100.00%				
3.25.06	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Jumlah produk yang bersertifikat</b>	<b>149</b>	<b>SKP</b>	<b>15,384,800.00</b>	<b>309</b>	<b>13,053,100.00</b>	<b>207.38%</b>	<b>84.84%</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	

3.25.06.1.03	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah produk yang bersertifikat	149	SKP	15,384,800.00	309	13,053,100.00	207.38%	84.84%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.06.1.03.01	Sub kegiatan Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan	100	buku	15,384,800.00	100.00	13,053,100.00	100.00%	84.84%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

**UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI**

3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	Nilai	1,552,056,874.00	78%	1,449,226,078.00	1.00%	93.37%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	Nilai	1,440,065,474.00	78%	1,355,773,799.00	1.00%	94.15%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	52	dokumen	1,440,065,474.00	52.00	1,355,773,799.00	100.00%	94.15%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	1	kawasan	25,791,800.00	1.00	21,701,130.00	100.00%	84.14%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1,050,000.00	1.00	921,000.00	100.00%	87.71%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	11,177,800.00	1.00	9,915,105.00	100.00%	88.70%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	10,000,000.00	1.00	9,782,500.00	100.00%	97.83%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1,764,000.00	1.00	722,525.00	100.00%	40.96%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1,800,000.00	0.5	360,000.00	50.00%	20.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	
3.25.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	-	-	-	0.00%	0.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat konsultasi SKPD	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	-	-	-	0.00%	0.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan	

3.25.01.1.07	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	1	kawasan	5,400,000.00	1.00	5,291,000.00	100.00%	97.98%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.07.10	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	1	kawasan	5,400,000.00	1.00	5,291,000.00	100.00%	97.98%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		1	kawasan	6,350,000.00	1.00	4,603,550.00	100.00%	72.50%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	JumlahKawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	450,000.00	1.00	450,000.00	100.00%	100.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	JumlahKawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	5,900,000.00	1.00	4,153,550.00	100.00%	70.40%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	1	kawasan	74,449,600.00	1.00	61,856,599.00	100.00%	83.09%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	74,449,600.00	1.00	61,856,599.00	100.00%	83.09%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
3.25.02.1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan pulau-pulau kecil	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1,448,614,928.00	1.00	1,170,640,717.46	100.00%	80.81%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1,448,614,928.00	1.00	1,170,640,717.46	100.00%	80.81%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
3.25.02.1.01.01	Pengelolaan kawasan Konsevasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1,448,614,928.00	1.00	1,170,640,717.46	100.00%	80.81%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan

**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**

3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78	Nilai	1,999,803,295.00	78%	1,781,931,755.00	1.00%	89.11%	UPTD Pelabuhan Perikanan
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78	Nilai	1,839,557,417.00	78%	1,663,435,882.00	1.00%	90.43%	UPTD Pelabuhan Perikanan
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52	dokumen	1,839,557,417.00	52.00	1,663,435,882.00	100.00%	90.43%	UPTD Pelabuhan Perikanan

3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan	78	Nilai	22,042,050.00	78%	12,586,950.00	1.00%	57.10%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	2,244,400.00	10.00	1,305,500.00	100.00%	58.17%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan dan Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	80	nelayan	16,221,650.00	80.00	9,316,950.00	100.00%	57.44%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	1,776,000.00	10.00	1,334,500.00	100.00%	75.14%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	1,800,000.00	10.00	630,000.00	100.00%	35.00%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	-	10.00	-	100.00%	#DIV/0!	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	16,560,780.00	10.00	7,220,875.00	100.00%	43.60%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	16,560,780.00	10.00	7,220,875.00	100.00%	43.60%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas dan gedung yang terpelihara	10	ton	121,643,048.00	10.00	98,688,048.00	100.00%	81.13%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	64,166,600.00	10.00	41,814,600.00	100.00%	65.17%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	57,476,448.00	10.00	56,873,448.00	100.00%	98.95%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.03.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	1	Pelabuhan	37,476,448.00	1.00	37,476,448.00	100.00%	100.00%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.03.1.06	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	60	Nelayan	37,476,448.00	60.00	37,476,448.00	100.00%	100.00%	UPTD Pelabuhan Perikanan	

3.25.03.1.06.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Terlaksananya Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Nelayan	60	nelayan	37,476,448.00	60.00	37,476,448.00	100.00%	100.00%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
<b>UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>											
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78	Nilai	2,276,307,140.00	78%	2,079,690,636.00	1.00%	91.36%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	52	dokumen	1,687,886,078.00	52.00	1,555,963,276.00	100.00%	92.18%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52	dokumen	1,687,886,078.00	52.00	1,555,963,276.00	100.00%	92.18%	UPTD Pelabuhan Perikanan	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah ATK yg tersedia, jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan, jumlah barang cetak dan penggandaan yg tersedia	3	paket	21,168,010.00	3.00	19,483,350.00	100.00%	92.04%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ATK yang disediakan	1	paket	3,782,010.00	1.00	3,008,000.00	100.00%	79.53%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	1	tahun	15,000,000.00	1.00	14,989,600.00	100.00%	99.93%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1	paket	2,386,000.00	1.00	1,485,750.00	100.00%	62.27%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3.25.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah materai yg tersedia, jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3	paket	207,063,868.00	3.00	176,682,926.00	100.00%	85.33%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	150	lembar	750,000.00	150.00	750,000.00	100.00%	100.00%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	

3.25.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	- Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	jenis	91,313,868.00	3.00	62,297,283.00	100.00%	68.22%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.25.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dan Jumlah Sistem Manajemen	2	paket	115,000,000.00	2.00	113,635,643.00	100.00%	98.81%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala</b>	<b>100%</b>	<b>persen</b>	<b>360,189,184.00</b>	<b>100%</b>	<b>327,561,084.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>90.94%</b>	<b>UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>
3.25.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3	unit	127,050,496.00	3.00	94,569,396.00	100.00%	74.43%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	16	unit	45,756,448.00	16.00	45,609,448.00	100.00%	99.68%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.25.01.1.09.09	- Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara	150	m2	187,382,240.00	150.00	187,382,240.00	100.00%	100.00%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
<b>3.25.06</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan</b>	<b>4900</b>	<b>Sample</b>	<b>348,064,012.00</b>	<b>5,039</b>	<b>305,729,800.00</b>	<b>102.84%</b>	<b>87.84%</b>	<b>UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>
<b>3.25.06.02</b>	<b>Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar</b>	<b>Rekomendasi hasil uji produk perikanan, terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan persyaratan sertifikasi SNI</b>	<b>2</b>	<b>paket</b>	<b>348,064,012.00</b>	<b>2.00</b>	<b>305,729,800.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>87.84%</b>	<b>UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>
3.25.06.02.01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolah dan pemasaran skala menengah dan besar.	Jumlah produk perikanan yang diuji	4900	sampel	325,964,012.00	5,039	283,629,800.00	102.84%	87.01%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.25.06.02.02	Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdava saing	Jumlah UPI yang di surveillance	9	UPI	22,100,000.00	9.00	22,100,000.00	100.00%	100.00%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

**UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT/PAYAU**

3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	Nilai	5,092,883,382.00	78%	3,666,479,490.00	1.00%	71.99%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
3.25.01.1.02	administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	Nilai	4,425,032,498.00	78%	3,105,149,602.00	1.00%	70.17%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	52	dokumen	3,196,935,255.00	52.00	3,105,149,602.00	100.00%	97.13%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
3.25.01.1.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	Presentase penerangan bangunan kantor yang tertangani, presentase upacara keagamaan yang tertangani, presentase pemeliharaan peralatan kantor yang tertangani dan presentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12	bulan	39,131,800.00	12.00	33,534,058.00	100.00%	85.70%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	3	jenis	1,434,600.00	3.00	1,304,181.00	100.00%	90.91%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
3.25.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5	jenis	4,260,000.00	5.00	2,714,002.00	100.00%	63.71%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
3.25.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	12	bulan	30,000,000.00	12.00	28,398,000.00	100.00%	94.66%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
3.25.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	3,437,200.00	12.00	1,117,875.00	100.00%	32.52%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
3.25.01.1.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli daerah [PAD]	12	bulan	116,160,000.00	12.00	80,107,385.00	100.00%	68.96%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

3.25.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	bulan	510,000.00	12.00	510,000.00	100.00%	100.00%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	bulan	115,650,000.00	12.00	79,597,385.00	100.00%	68.83%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Peningkatan Pendapatan asli Daerah [PAD]</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>512,559,084.00</b>	<b>12.00</b>	<b>447,688,445.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>87.34%</b>	<b>UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut</b>	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	5	jenis	156,628,096.00	5.00	122,447,791.00	100.00%	78.18%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	12	bulan	326,917,588.00	12.00	325,240,654.00	100.00%	99.49%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	
<b>3.25.04</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]</b>	<b>284400000</b>	<b>rupiah</b>	<b>4,328,284,572.00</b>	<b>450158800</b>	<b>2,912,150,482.54</b>	<b>158.28%</b>	<b>67.28%</b>	<b>UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut</b>	
<b>3.25.04.1.05</b>	<b>Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut</b>	<b>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]</b>	<b>284400000</b>	<b>rupiah</b>	<b>4,328,284,572.00</b>	<b>450158800</b>	<b>2,912,150,482.54</b>	<b>158.28%</b>	<b>67.28%</b>	<b>UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut</b>	
3.25.04.1.05.03	Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	Tersedianya benih, benih calon induk, induk ikan air payau	12	bulan	1,253,606,600.00	12.00	853,180,488.00	100.00%	68.06%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	



3.25.04.1.05.05	Penyediaan sarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	Tersedianya calon induk dan induk ikan air tawar	12	bulan	3,074,677,972.00	12.00	2,058,969,994.54	100.00%	66.97%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----	-------	------------------	-------	------------------	---------	--------	-------------------------------------------------	--

## Lampiran III

**Tabel T-C 31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali Tahun 2023**

No	Rancangan RKPD Provinsi Bali				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	
			Capaian	Indikatif			Capaian	Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80	33,231,386,072.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80	22,224,880,461.00	Dinas dan UPTD
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya	5 Kawasan	884,968,933.00	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya	5 Kawasan	78,952,896.00	
		Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	137,493,240.00		Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	100,000,000.00	UPTD KKP
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	107.269,84 Ton	1,581,752,539.00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	107.269,84 Ton	349,822,496.00	
		Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	2 Palabuhan	126,976,000.00		Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	1 Palabuhan	76,000,000.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	19.360,82 Ton	1,476,076,125.00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	19.360,82 Ton	-	
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]	313.551.000 Rupiah	2,140,583,496.00		Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	234,998,800.00	UPTD P2BAPL
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah pelaku usaha taat Hukum	23 Pelaku Usaha	500,000,000.00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah pelaku usaha taat Hukum	23 Pelaku Usaha	42,101,400.00	
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk yang bersertifikat	151 SKP	290,000,000.00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan yang bersertifikat	151 SKP	124,872,896.00	

	Jumlah Hasil Uji yang Dikeluarkan	5000 Sample	1,910,752,793.00	Jumlah Hasil Uji yang Dikeluarkan	5000 Sample	235,244,800.00	UPTD PPMHP		
			<b>Total</b>	<b>42,279,989,198.00</b>				<b>Total</b>	<b>23,466,873,749.00</b>

**Tabel T-C 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2024**  
**Provinsi Bali**

Unit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Kota Denpasar, Denpasar Utara	80 Nilai	Rp 19,819,014,545	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		81 Nilai	Rp 29,603,753,480
3.25.01.101	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>		100 Persen	Rp 40,045,100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	Rp 63,400,000
3.25.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	Rp 19,689,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	Rp 22,000,000
3.25.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp 1,350,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	Rp 2,100,000
3.25.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp 1,350,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	Rp 2,100,000
3.25.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp 1,350,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	Rp 2,100,000
3.25.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp 1,350,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	Rp 2,100,000
3.25.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	Rp 14,955,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	Rp 33,000,000
3.25.01.102	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN</i>		260 Dokumen	Rp 18,566,131,889	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260 Dokumen	Rp 25,680,353,480

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		118 Orang/Bulan	Rp 18,566,131,889	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		118 Orang/Bulan	Rp 25,680,353,480
3.25.01.109	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>		<i>100 Persen</i>	<i>Rp 1,212,837,556</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>		<i>100 Persen</i>	<i>Rp 3,860,000,000</i>
3.25.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		8 Unit	Rp 436,757,384	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 Unit	Rp 2,160,000,000
3.25.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	Rp 776,080,172	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	Rp 1,700,000,000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
3.25.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya	Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar	5 Kawasan	Rp 78,952,896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Kawasan	Rp 149,952,896
3.25.02.103	<i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	<i>Jumlah Fasilitas pendampingan peningkatan produksi petani garam</i>		<i>4 Kelompok</i>	<i>Rp 78,952,896</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>		<i>4 Kelompok</i>	<i>Rp 149,952,896</i>
3.25.02.103.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		30 Orang	Rp 78,952,896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	Rp 149,952,896
3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar	107.269,84 Ton	Rp 349,822,496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		109.415,24 Ton	Rp 1,600,000,000
3.25.03.101	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	<i>Jumlah data dan Informasi sumber daya ikan</i>		<i>3 Kali</i>	<i>Rp 349,822,496</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>		<i>3 Kali</i>	<i>Rp 1,600,000,000</i>

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.03.101.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		4 Unit	Rp 349,822,496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Unit	Rp 1,600,000,000
3.25.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Jumlah pelaku usaha taat Hukum</b>	<b>Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar</b>	<b>23 Pelaku Usaha</b>	<b>Rp 42,101,400</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>23 Pelaku Usaha</b>	<b>Rp 110,000,000</b>
3.25.05.101	<i>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</i>	<i>Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha</i>		<i>18 Pelaku Usaha</i>	<i>Rp 42,101,400</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>		<i>18 Pelaku Usaha</i>	<i>Rp 110,000,000</i>
3.25.05.101.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		5 Dokumen	Rp 24,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	Rp 110,000,000
3.25.05.101.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		3 Dokumen	Rp 18,101,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	Rp -
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah produk perikanan yang bersertifikat</b>	<b>Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar</b>	<b>151 SKP</b>	<b>Rp 124,872,896</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>310 SKP</b>	<b>Rp 320,000,000</b>
3.25.06.102	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	<i>Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi standar</i>		<i>25 Unit Usaha</i>	<i>Rp 124,872,896</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>		<i>25 Unit Usaha</i>	<i>Rp 320,000,000</i>
3.25.06.102.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		25 Unit Usaha	Rp 124,872,896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Unit Usaha	Rp 320,000,000

Tabel T-C.33  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Perkiraan Maju Tahun 2024  
Provinsi Bali**

Unit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Kab. Klungkung, Kota Denpasar	80 Nilai	Rp 1,085,458,304	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80 Persen	Rp 1,194,004,134
3.25.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100 Persen	Rp 41,581,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	Rp 45,739,320
3.25.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 3,400,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	Rp 3,740,000
3.25.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 38,181,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	Rp 41,999,320
3.25.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		100 Persen	Rp 1,043,877,104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	Rp 1,148,264,814
3.25.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	Rp 81,189,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	Rp 89,308,780
3.25.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp 962,687,304	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	Rp 1,058,956,034
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kab. Klungkung, Kota Denpasar	1 Kawasan	Rp 100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Kawasan	Rp 110,000,000
3.25.02.101	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan		20.057 Ha	Rp 100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.045,48 Ha	Rp 110,000,000
3.25.02.101.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		20.057 Ha	Rp 100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.045,48 Ha	Rp 110,000,000

Tabel T-C.33  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Perkiraan Maju Tahun 2024  
Provinsi Bali**

Unit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : UPTD Pelabuhan Perikanan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Kab.Buleleng, Kota Denpasar	80 Nilai	Rp 187,941,896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80 Persen	Rp 515,000,000
3.25.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100 Persen	Rp 42,660,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	Rp 220,000,000
3.25.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 6,607,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	Rp 150,000,000
3.25.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 36,053,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	Rp 70,000,000
3.25.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		100 Persen	Rp 145,280,996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	Rp 295,000,000
3.25.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit	Rp 58,815,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	Rp 125,000,000
3.25.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp 86,465,996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	Rp 170,000,000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar	1 Pelabuhan	Rp 76,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Pelabuhan	Rp 95,000,000
3.25.03.106	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah nelayan yang terampil dalam penanganan CPIB dan keamanan keselamatan nelayan		50 Nelayan	Rp 76,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Nelayan	Rp 95,000,000



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.03.106.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan		1 Pelabuhan Perikanan	Rp 76,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Pelabuhan Perikanan	Rp 95,000,000

Tabel T-C.33  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Perkiraan Maju Tahun 2024**  
Provinsi Bali

Unit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	80 Nilai	Rp 529,801,436	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80 Persen	Rp 618,682,443
3.25.01.106	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>		<i>100 Persen</i>	<i>Rp 36,851,300</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>		<i>100 Persen</i>	<i>Rp 43,485,200</i>
3.25.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 36,851,300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	Rp 43,485,200
3.25.01.109	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>		<i>100 Persen</i>	<i>Rp 492,950,136</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>		<i>100 Persen</i>	<i>Rp 575,197,243</i>
3.25.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	Rp 123,247,896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Unit	Rp 150,092,686
3.25.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp 369,702,240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	Rp 425,104,557
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Hasil Uji yang Dikeluarkan		5000 Sample	Rp 235,244,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5100 Sample	Rp 2,101,828,072
3.25.06.102	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	<i>Jumlah UPI yang Menerapkan Persyaratan Sertifikasi SNI</i>		<i>37 UPI</i>	<i>Rp 235,244,800</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>		<i>37 UPI</i>	<i>Rp 2,101,828,072</i>
3.25.06.102.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		30 Unit Usaha	Rp 230,744,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Unit Usaha	Rp 2,046,828,072

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.06.102.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing		7 Unit Usaha	Rp 4,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Unit Usaha	Rp 55,000,000

Tabel T-C.33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Perkiraan Maju Tahun 2024  
Provinsi Bali

Unit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Kab.Badung, Kab.Jembrana, Kab.Klungkung	80 Nilai	Rp 602,664,280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80 Persen	Rp 690,000,000
3.25.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100 Persen	Rp 34,302,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	Rp 45,000,000
3.25.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 34,302,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	Rp 45,000,000
3.25.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		100 Persen	Rp 568,361,480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	Rp 645,000,000
3.25.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	Rp 152,307,896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	Rp 185,000,000
3.25.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	Rp 416,053,584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	Rp 460,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut		3 komoditas ( Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	Rp 234,998,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 komoditas ( Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	Rp 2,300,000,000
3.25.04.105	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Induk Ikan Unggul		1.210.000 Ekor	Rp 234,998,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.300.000 Ekor	Rp 2,300,000,000
3.25.04.105.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah benih, calon induk dan induk		1.210.000 Ekor	Rp 234,998,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.300.000 Ekor	Rp 2,300,000,000



பீயிங்கு பூபிங்கு பீயி

PEMERINTAH PROVINSI BALI

தீகம ஸீயுதகிதகிபிங்கிதகி

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

கலகிபமீயுதகிதகிபிங்கிதகி - பீயி (பிங்கிதகி)  
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234)  
பிங்கிதகி (பிங்கிதகி) பிங்கிதகி  
TELEPON (0361), 223562

WEBSITE: [www.diskelkan.baliprov.go.id](http://www.diskelkan.baliprov.go.id) EMAIL: [dislautkan@baliprov.go.id](mailto:dislautkan@baliprov.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NOMOR : 17B TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIK PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA);
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Kerja dipandang perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 nomor 6 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
  - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
  - c. menggendakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; dan
  - d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali

pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI BALI,



I. I MADE SUDARSANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199203 1 017

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 exemplar).
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI BALI  
NOMOR : 17B TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN TIM TEKNIS  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
(RENJA) TAHUN 2023 DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi  
Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan  
Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kelautan  
2. Kepala Bidang Perikanan  
3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil  
Perikanan  
4. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan  
Perikanan  
5. Kepala UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali  
6. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan  
7. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil  
Perikanan  
8. Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air  
Payau/Laut

Ditetapkan di Bali

pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI BALI,



I. I MADE SUDARSANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199203 1 017